



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2018**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 sehingga dapat tersusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Perangkat Daerah selama Tahun 2017, sebagai konsekuensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yaitu : “ ***Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa*** ”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022 dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017.

Buntok, Maret 2018

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta bertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*). Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memuat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2017 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, disusun berdasarkan dan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2017.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik	Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik	Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan	Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah	Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat
2017	2018	2019	2020	2021	2022

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 berpedoman pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

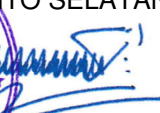
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 yang merupakan kondisi awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sehingga dalam pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja masih memerlukan perencanaan yang matang.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance).

Buntok, Maret 2018

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

INSPEKTORAT

*Jln. Pelita Raya No. 60 Telp. (0525) 21262 Fax (0525) 22357 Kode Pos 73711
B U N T O K*

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan .

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Buntok, 12 Maret 2018

**INSPEKTUR**
KABUPATEN BARITO SELATAN
GANDA DAYA BINA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660419 198602 1 002



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-2
1. Kondisi Geografis	I-2
2. Batas Wilayah Administrasi	I-2
3. Luas Wilayah	I-3
4. Jenis Tanah	I-4
5. Hidrologis	I-5
6. Demografis	I-5
C. Kondisi Ekonomi	I-7
1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	I-7
D. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	I-8
1. Aspek Politik	I-9
2. Aspek Manajemen Pemerintah	I-9
3. Kewenangan	I-9
4. Tugas Pokok	I-10
5. Struktur Organisasi	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-15
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	II-15
B. Visi Dan Misi	II-17
C. Program Utama Prioritas Pembangunan Daerah	II-24



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

D. Indikator Kinerja Utama	II-35
E. Perjanjian Kinerja	II-43
F. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	II-51
E. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2017-2022	II-32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-62
A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program	III-63
1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah	III-64
2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	III-66
3. Revitalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenteram	III-70
4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	III-72
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah	III-77
6. Peningkatan Program Peningkatan Partisipasi Publik	III-77
7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	III-79
BAB IV PENUTUP	IV-83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan	3
Gambar 2	Hubungan Antara Elemen Visi	18
Gambar 3	Tema Pembangunan Tahunan RKPd 2017-2022	50
Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan	4
Tabel 2	Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Barito Selatan	4
Tabel 3	Hidrologis Wilayah Kabupaten Barito Selatan	5
Tabel 4	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan	6
Tabel 5	Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan Kabupaten Barito Selatan	7
Tabel 6	PDRB Kabupaten Barito Selatan	9
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 8	Perjanjian Kinerja	45
Tabel 9	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 - 2022	53
Tabel 10	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022	56



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Tabel 11	Pencapaian Pemerataan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Selatan	64
Tabel 12	Pencapaian Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	66
Tabel 13	Pencapaian Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	68
Tabel 14	Pencapaian Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tentram	71
Tabel 15	Pencapaian Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	72
Tabel 16	Pencapaian Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah	73
Tabel 17	Pencapaian Program Peningkatan Partisipasi Publik	77
Tabel 18	Pencapaian Program Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	80



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomi pada 1°20' Lintang Selatan 2°35' Lintang Selatan dan 114° - 115° Bujur Timur.

2. Batas Wilayah Administrasi

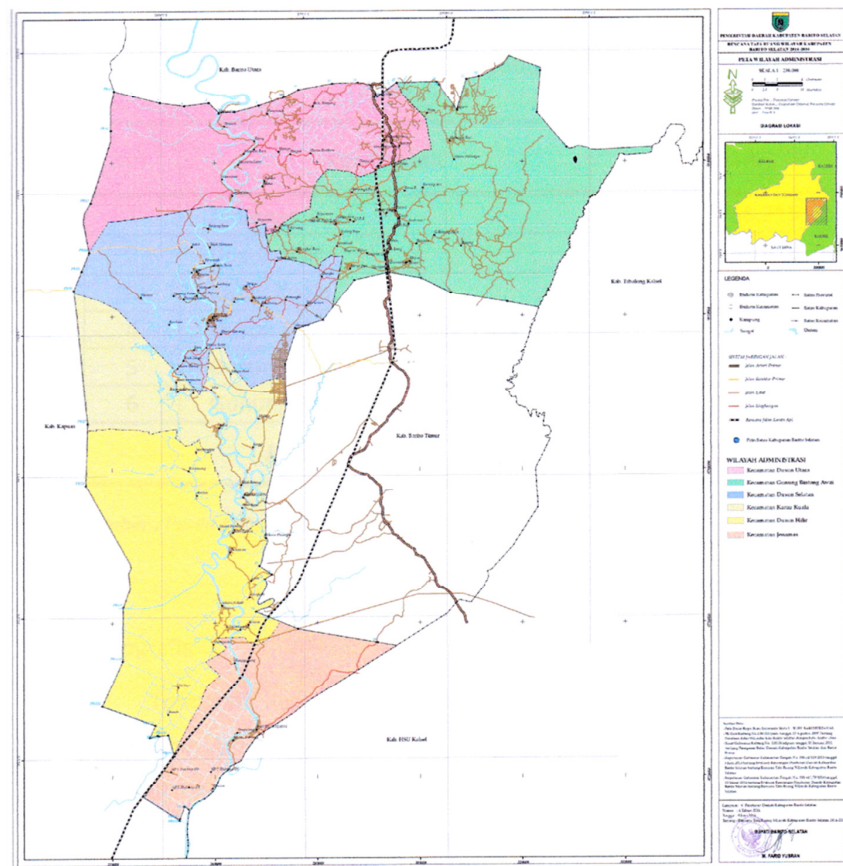
Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan



3. Luas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Kabupaten Barito Selatan memiliki luas 883.000 hektar, namun setelah dilakukan pelacakan dan penetapan batas oleh Tim Tata Batas antar Kabupaten dan Tim Tata Batas Provinsi, maka titik batas Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan titik batas Kabupaten diatas, maka diperoleh luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 7.020,09 Km², yang terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dengan nama dan luas wilayah masing-masing Kecamatan :

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Jenamas	708
2.	Dusun Hilir	2.065
3.	Karau Kuala	1.099
4.	Dusun Selatan	1.829
5.	Dusun Utara	1.196
6.	Gunung Bintang Awai	1.993
Jumlah		8.830

Sumber : Barsel dalam angka 2015

4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terbentuk di Kabupaten Barito Selatan, erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Aluvial	263.151,5	41,5
2	Organosol	131.892,8	20,8
3	Podsolik	71.019,2	11,2
4	Podsol	48.925,7	7,7
5	Litosol	39.948,3	6,3
6	Kambisol	27.266,3	4,3
7	Regosol	52.630,3	8,2

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Barsel



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

5. Hidrologis

Di wilayah Kabupaten Barito Selatan terdapat satu sungai besar yang mengalir dari Utara ke Selatan dan bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Barito dengan panjang seluruhnya mencapai 900 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 500 meter, dengan anak sungai sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 3.
Hidrologis Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No.	Nama Anak Sungai	Panjang (Km)	Rata-Rata (m)	
			Lebar	Kedalaman
1.	Sungai Jenamas	3	9	7-8
2.	Sungai Kalanis/Napu	165	7	1-10
3.	Sungai Mangkatip	160	8	1-9
4.	Sungai Karau/Bangkuang	120	12	5-6
5.	Sungai Puning	50	30	8
6.	Sungai Ayuh	100	10	6
7.	Sungai Bamanen/Bundar	20	25	8
8.	Sungai Tabuk/Buntok Kota	20	6	6-8
9.	Sungai Telang	10	12	6-8
10.	Sungai Janggi	10	10	4-6
11.	Sungai Bahaur	50	30	8-10

Sumber : Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Barsel

6. Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 sebanyak 143.433 jiwa yang terdiri laki 73.977 jiwa dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

perempuan 69.456 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk tahun 2016 mencapai 1 jiwa/Km² yang menyebar di 6 (enam) Kecamatan, dengan penyebaran menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan
tersebar di 6 (enam) Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Jumlah Penduduk (jiwa)	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Jenamas	708	5.208	5.008
2.	Dusun Hilir	2.065	8.993	8.336
3.	Karau Kuala	1.099	8.475	8.049
4.	Dusun Utara	1.829	9.587	8.896
5.	G. Bintang Awai	1.196	10.838	9.903
6.	Dusun Selatan	1.993	30.876	29.264
		8.830	73.977	69.456

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

b. Jumlah Desa dan Kelurahan

Kabupaten Barito Selatan mempunyai wilayah yang terbagi dalam 6 (enam) kecamatan dimana 5 (lima) kecamatan diantaranya terletak di sepanjang alur Sungai Barito yang membelah wilayah Kabupaten ini dari utara hingga ke selatan. Berdasarkan data yang ada, jumlah desa dan kelurahan per kecamatan, dapat ditampilkan dalam table berikut ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Tabel 5.
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan
Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Jenamas	4	1
2.	Dusun Hilir	9	1
3.	Karau Kuala	10	1
4.	Dusun Selatan	24	3
5.	Dusun Utara	18	1
6.	G. Bintang Awai	21	-
Jumlah		86	7

C. Kondisi Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran taraf hidup suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Distribusi persentase PDRB menurut Lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
PDRB Kabupaten Barito Selatan

No.	Tahun	
1.	2011	7,06
2.	2012	5,32
3.	2013	5,22
4.	2014	5,69
5.	2015	9,97
6.	2016	<i>dalam proses</i>

***) BPS Kab. Barito Selatan Tahun 2016*

D. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

1. Aspek Politik

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Manajemen Pemerintah

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (asset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

3. Kewenangan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

4. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan dibantu oleh :

1. Wakil Bupati,
2. Sekretaris Daerah ;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Asisten Administrasi Umum;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan ESDM;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretariat Daerah yang terdiri 9 (sembilan) bagian :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bagian Perekonomian dan SDA;
 - e. Bagian Pembangunan;
 - f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Bagian Organisasi;
 - h. Bagian Keuangan dan Aset Setda;
 - i. Bagian Umum;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Dinas terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

- h. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - i. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - n. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12. Badan terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kecamatan ada 6 (enam) terdiri atas :
- a. Kecamatan Jenamas;
 - b. Kecamatan Dusun Hilir;
 - c. Kecamatan Karau Kuala;
 - d. Kecamatan Dusun Selatan;

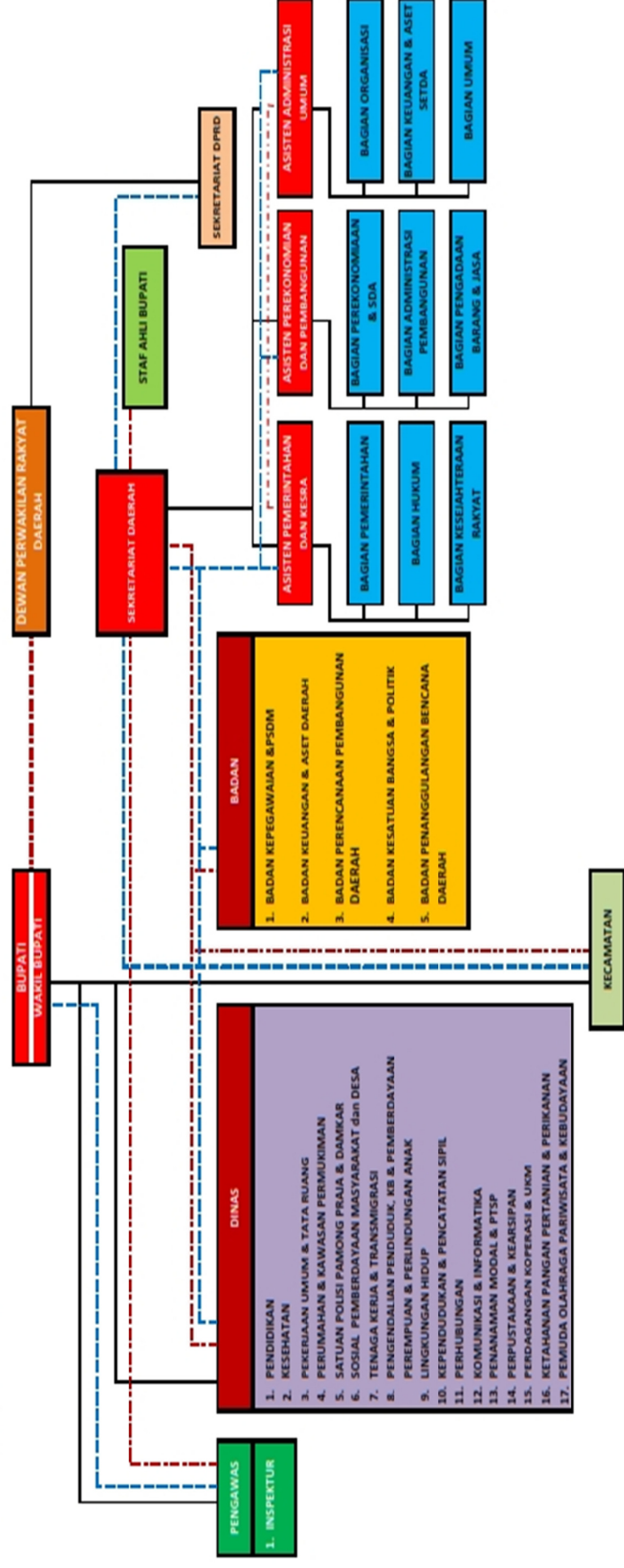


**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

- e. Kecamatan Dusun Utara;
 - f. Kecamatan Gunung Bintang Awai
17. Kelurahan ada 7 (tujuh) terdiri atas :
- a. Kelurahan Rantau Kujang;
 - b. Kelurahan Mangkatip;
 - c. Kelurahan Bangkuang;
 - d. Kelurahan Buntok Kota;
 - e. Kelurahan Hilir Sper;
 - f. Kelurahan Jelapat;
 - g. Kelurahan Pendang

6. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

(Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan)



CATATAN :
GABIS KOMANDO
GABIS PERTANGGUNGJAWABAN
GABIS KOORDINASI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa paling lambat 6 (enam)



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, maka Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sudah ditetapkan. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Barito Selatan pada tanggal 22 Mei 2017, maka berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat sudah ditetapkan pada akhir bulan Nopember 2017 dengan periodisasi RPJMD Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 pada dasarnya adalah merupakan himpunan dari seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebaiknya harus disusun secara simultan atau bersamaan waktunya oleh segenap komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *Dahani Dahanai Tuntung Tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, merupakan manifestasi dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

berkesinambungan. Dengan menyusun RPJMD yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Barito Selatan lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang. Bagi manajemen pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dokumen rencana strategis ini dapat dipandang sebagai :

B. Visi Dan Misi

Visi adalah keadaan yang diharapkan terwujud dalam masa lima tahun atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



Visi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa”



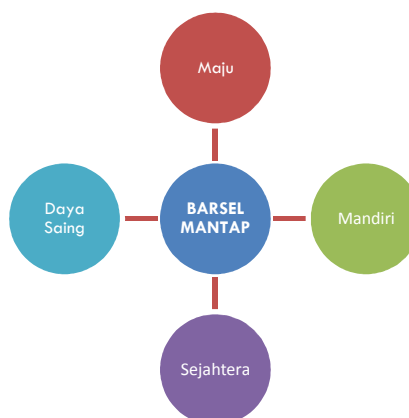
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu:

- 1) **Maju;**
- 2) **Mandiri;**
- 3) **Sejahtera, dan**
- 4) **Daya Saing**

yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)**, sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2
Hubungan antar-elemen Visi



Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)

Adapun yang dimaksud dengan Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang MAJU DAN MANDIRI, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang SEJAHTERA SECARA MERATA adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

Adapun yang dimaksud dengan **Kabupaten Barito Selatan yang memiliki DAYA SAING dilandasi IMAN DAN TAQWA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Dari pernyataan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkeinginan untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang *dahani dahanai tuntung tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq (taqwa).

Visi Kabupaten Barito Selatan tersebut diwujudkan dalam keinginan tekad dan komitmen bersama yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Barito Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Membangunan dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan serta pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik desa dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa yang jauh dari jaringan listrik dan; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah; penyelesaian dan dan penuntasan pembangunan ruas jalan provinsi, kabupaten, jembatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20 %; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas peringkat 5 se Kalimantan Tengah.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam; meningkatkan ekspor non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat, yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan
4. Meningkatkan kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan daerah Barito Selatan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

C. Program Utama Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penjelasan ketujuh prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang menjadi **program utama** yang akan menjadi rujukan / acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun program kerja dimasing-masing Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah Pemerataan Infrastruktur Daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.
3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.
5. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan di Barito Selatan.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas

Strategi kedua adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi.
3. Menurunnya angka kematian ibu.
4. Menurunnya angka gizi buruk.
5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
6. Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur desa, akan dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang Aman dan Tentram

Strategi yang ketiga yaitu peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat upaya untuk menciptakan kondisi pengamalan agama yang baik adalah kerukunan antarumat beragama di antaranya agar



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

terjadinya dialog atau diskusi antarumat beragama, pertemuan para alim ulama atau tokoh masing-masing agama, memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut; dan meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terus akan dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati ; (4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan keempat adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Produksi hasil pertanian.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
3. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
4. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.
5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
6. Menurunnya angka kemiskinan.
7. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
8. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
9. Meningkatnya daya beli masyarakat.
10. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi local.
11. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll).
12. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
13. Terpasarnya pariwisata daerah.
14. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.
15. Meningkatnya sektor ekonomi hijau.

Strategi pembangunan ini dilaksanakan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah

Strategi pembangunan kelima adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomodatif dan konsisten.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Strategi ini menekankan bahwa dalam pembangunan harus dilandasi dengan pendekatan pendayagunaan sumberdaya alam dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Pola konsumsi sumberdaya alam seharusnya memberi kesempatan dan peran-serta masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari .

Penggalian dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu inti dari prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa-masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedepankan pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global yang harus diperhatikan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat unggulan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Peningkatan Partisipasi Publik

Strategi pembangunan keenam adalah peningkatan partisipasi publik. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll).
3. Meningkatnya peran pemuda.
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebihluas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukanberdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasimasyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebihbanyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif,efesien, dan berkelanjutan.

Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka, (2) jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan (dan haknya), untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, maka pembangunan diperkirakan berlangsung lebih efektif dan efisien.

7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Strategi pembangunan ketujuh adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi,. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
5. Predikat penyelenggara-raan pemerintahan daerah.
6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dengan dukungan dari sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2017)	TARGET TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Meningkatkan cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,23
1.2 Meningkatkan cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90	90	100	100	100	100



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

1.3	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5	55,5	61,05	67,16	73,87	81,26
1.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.	jumlah rumah layak huni (unit)	28.063	28.063	28.313	28.563	28.813	29.063
1.5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,35
1.6	Pencapaian Kawasan Kumuh	Rasio kawasan Kumuh	15	10	5	0	0	0
1.7	Sanitasi Layak	Rasio Kawasan Sanitasi Layak	65	85	90	100	100	100
2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,5	70,9	71,4	72,0	72,75	72,75
2.2	Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)	6	5	5	5	4	4
2.3	Menurunnya angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	89	89	89	89	45	45
2.4	Menurunnya angka gizi buruk	Prevalensi gizi buruk	5 %	4 %	4 %	3,5 %	3,5 %	3 %
	Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	75 %	78,5 %	80 %	83 %	85 %	85 %
	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bagi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Berobat Yang Terlayani Dipelayanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Serta Tata Kelola Layanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	41,6 %	66,6 %	91,6 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas	Tersedianya Tenaga Dokter Umum di	20	20	20	20	20	20



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

dan RS	Puskesmas						
	Tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di RS	6	7	8	8	8	8
Mewujudkan Lingkungan Sehat di Masyarakat	Persentase Kasus DBD yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	54,1 %	61,35 %	65 %	70 %	75 %	75 %
2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR)	76,79 %	76,50 %	76,55 %	76,50 %	76,65 %
	Meningkatnya Partisipasi Angka Kerja Perempuan	Persentase Partisipasi Angka Kerja Perempuan	47,50 %	47,75 %	48,00 %	48,25 %	48,50 %
	Meningkatnya Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD	Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD	36 %	36 %	36 %	36 %	40 %
3.1	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pelaksanaan DIKLAT, dan BIMTEK					
3.2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	12	12	12	12	12
4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Cakupan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan (%)					
5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Pertumbuhan produksi rata-rata komoditas tanaman pangan dan hortikultura (%)	7,2	7,2	8,41	9,64	10,2
6.1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya (%)					



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

6.2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya (%)						
7.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	8	8	8	8	8	8
7.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Angka Indeks Gini Rasio						
7.3	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5,4	5,4	4,65	3,91	3,17	2,43
7.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	25	25,55	30,76	32	34,25	36,5
7.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	4,1	4	3,8	3,7	3,6	3,5
7.6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan Ekonomi	7,1	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	1.900	250	260	275	275	300
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	30	40	80	100	150	200
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	62	35	30	25	20	15
		Angka sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Kasus)	5	5	4	4	3	3
		Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

8.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase K-UMKM aktif (%)	80	85	87	89	91	95
8.2	Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll)	Stabilitas Harga Jual Produk Unggulan Daerah						
9.1	meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kenaikan Pendapatan Daerah						
10.1	Terpasarnya pariwisata daerah	Jumlah wisatawan (%)	27	30	35	37	40	40
11.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ribuan Rp)	568.009	568.009	575.308	582.708	594.708	598.009
11.2	Meningkatnya sektor ekonomi hijau							
12.1	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	70	70	72,5	80	83	85
12.2	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten							
13.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi hak pilihnya pada Pemilu	85	85	87	89	90	90



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

13.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)	Dokumen Kependudukan						
14.1	Meningkatnya peran pemuda	Cakupan Pembinaan Lembaga pemuda (%)	25	27	35	40	43	47
14.2	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase prestasi olah raga (%)	15	20	25	30	35	35,5
15.1	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	Persentase SKTA yang diterbitkan	26,25	26,25	26,5	26,75	27	27,25
16.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
16.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	84	86	88	88
16.3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		65	75	80	85	85
16.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah	C	CC	CC	B	B	BB
16.5	Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	Hasil predikat penyelenggaraan pemerintahan	B	B	BB	BB	BB	A
16.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	39 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	20	15	10	5	5	5
	Meningkatnya Kinerja pegawai	Persentase Kinerja pegawai	40 %	30 %	20 %	10 %	5 %	5 %
17.1	Meningkatnya ketersediaan layanan dan akses perpustakaan bagi masyarakat umum pada ruang publik dan pedesaan.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,20 %	0,24 %	0,28 %	0,34 %	0,41 %	0,49 %



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

17.2	Meningkatnya ketersediaan layanan dan akses perpustakaan bagi pelajar dan mahasiswa.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,88 %	0,88 %	0,84 %	0,81 %	0,78 %	0,75 %
17.3	Meningkatnya Kualitas dan diVerifikasi Layanan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	0,56 %	0,59 %	0,62 %	0,65 %	0,68 %	0,70 %
		Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	397,08	476,50	571,83	686,17	823,42	988,08
17.4	Meningkatnya Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat Melalui Pemasyarakatan Perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28.757	28.757	30.507	32.507	34.757	37.257
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sesuai standar kearsipan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	20%	40%	60%	80%	100%
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	1	2	3	3	3
18.1		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pimpinan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	394 Orang	512 Orang	666 Orang	866 Orang	1.126 Orang	1.464 Orang

E. Perjanjian Kinerja

Merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kinerjanya.

Merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

penggunaan kontrak kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*** yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 merupakan *kondisi kinerja awal periode RPJMD Tahun 2017-2022*. Perjanjian kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2017, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi.

Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

(KUA), APBD Tahun 2017, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2017. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017.

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*** Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel. 8

Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2017)
1		2	3
1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,66
2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90
3	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.	jumlah rumah layak huni (unit)	28.063



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,66
6	Pencapaian Kawasan Kumuh	Rasio kawasan Kumuh	15
7	Sanitasi Layak	Rasio Kawasan Sanitasi Layak	65
8.	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,5
9.	Menurunnya angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	89
10.	Menurunnya angka gizi buruk	Prevalensi gizi buruk	5 %
11.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bagi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Berobat Yang Terlayani Dipelayanan Kesehatan	100 %
12.	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Serta Tata Kelola Layanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	41,6 %
13.	Penyediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas dan RS	Tersedianya Tenaga Dokter Umum di Puskesmas	20
		Tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di RS	6
14.	Mewujudkan Lingkungan Sehat di Masyarakat	Persentase Kasus DBD yang Tertangani	100 %
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	54,1 %
15.	Meningkatnya Partisipasi Angka Kerja Perempuan	Persentase Partisipasi Angka Kerja Perempuan	47,50 %
16.	Meningkatnya Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD	Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD	36 %
17.	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pelaksanaan DIKLAT, dan BIMTEK	
18.	Meningkatnya akses dan	Angka melek huruf	98,9



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

	layanan pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	12
19.	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Cakupan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan (%)	
20.	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Pertumbuhan produksi rata-rata komoditas tanaman pangan dan hortikultura (%)	7,2
21.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya (%)	
22.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya (%)	
23.	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	8
24.	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	25
25.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase angkatan kerja perempuan	47,50
27.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan Ekonomi	7,1
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	1.900
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	30
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	62
		Angka sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Kasus)	5
		Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	2
28.	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase K-UMKM aktif (%)	80



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

29.	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ribuan Rp)	568.009
30.	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	70
31.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi hak pilihnya pada Pemilu	85
32.	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)	Dokumen Kependudukan	
33.	Meningkatnya peran pemuda	Cakupan Pembinaan Lembaga pemuda (%)	25
34.	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase prestasi olah raga (%)	15
35.	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	Persentase SKTA yang diterbitkan	26,25
36.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP
37.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
38.	Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	
39.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Hasil peniaian kinerja pemerintah daerah	C
40.	Predikat penyelenggara-raan pemerintahan daerah	Hasil predikat penyelenggara-raan pemerintahan	B
41.	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	39 %
		Jumlah Temuan BPK	20
42.	Meningkatnya ketersediaan layanan dan akses perpustakaan bagi pelajar dan mahasiswa.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,88 %



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

		Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	397,08
43.	Meningkatnya Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat Melalui Pemasyarakatan Perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28.757

F. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program perangkat daerah untuk mewujudkan setiap sasaran. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar .3
Tema Pembangunan Tahunan RKPD 2017 s.d. 2022

<i>Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik</i>	<i>Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik</i>	<i>Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan</i>	<i>Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat</i>	<i>Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah</i>	<i>Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat</i>
2017	2018	2019	2020	2021	2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

- 1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2017 :
“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.
- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2018 :
“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2019 :
“Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan”.
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2020 :
“Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat”.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

- 1.5 Tema Pembangunan pada Tahun 2021 :
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”.
- 1.6 Tema Pembangunan pada Tahun 2022 :
“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”.

G. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2017-2022.

Memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tema-tema pembangunan setiap tahun, maka selanjutnya akan ditetapkan arah pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Tabel 9. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Strategi		Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemerataan infrastruktur wilayah	1	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	x	x				
	2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan	x	x	x	x	x	x
	3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak	x	x	x	x	x	x
	4	Peningkatan ketercukupan energi	x	x	x			
	5	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr	x	x	x			
	6	Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh	x	x	x			
	7	Peningkatan ketersediaan sumber daya air	x	x	x	x		
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas	8	Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan		x	x	x		
	9	Optimalisasi manajemen pendidikan		x	x	x		
	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	x	x	x			
	11	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan			x	x	x	x
	12	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	x	x	x	x	x	x
	13	Peningkatan Akreditasi Sarana Kesehatan	x	x	x	x	x	x



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

3.	Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	14	Meningkatnya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	x	x						
		15	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		x						
		16	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	x	x	x					x
4.	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah	17	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis	x	x	x	x				x
		18	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	x	x	x	x				
		19	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		x	x	x				
		20	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan		x	x	x				
		21	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan	x	x	x	x				
		22	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	x	x	x	x				
		23	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	x	x	x	x				x
		24	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)			x	x				
		25	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal		x	x	x				
		26	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	x	x	x	x				x
		27	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	x	x	x	x				
		28	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis	x	x	x	x				x
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah										



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

	44	Presentase produk kebijakan yang responsif gender		x	x	x		
	45	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	x	x	x	x	x	
7.	46	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	x	x	x	x	x	x
	47	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan			x	x	x	x
	48	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	x	x				
	49	Peningkatan standar pelayanan publik	x	x	x			
	50	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		x	x			
	51	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi		x	x	x		
	52	Reformasi Birokrasi	x	x	x	x	x	x

sedangkan untuk sinkronisasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Tabel 10. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
Misi 1:	1.		Strategi (1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah	1.1	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi
Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.	1.1		1.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan
		1.2		1.3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak
		1.3		1.4	Peningkatan ketercukupan energy
		1.4		1.5	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr
		1.5		1.6	Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh
		1.6		1.7	Peningkatan ketersediaan sumber daya air



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Misi 2:	2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan	2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Strategi (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	2.1	Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia	3.	Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan	2.2	Menurunnya angka kematian bayi		2.2	Optimalisasi manajemen pendidikan
			2.3	Menurunnya angka kematian ibu		2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			2.4	Menurunnya angka gizi buruk		2.4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)		2.5	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat
			3.1	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan			
Misi 3:	4.	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah	3.2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	3.1	Meningkatnya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat
			4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat		3.2	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
						3.3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian		4.1	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
						4.2	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin
Misi 3:	5.	Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat			Strategi (4) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

6. Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.	6.	Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat	6.1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		4.3	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
			6.2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		4.4	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan
	7.	Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal	7.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi		4.5	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan
			7.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		4.6	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian
			7.3	Menurunnya angka kemiskinan		4.7	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
			7.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja		4.8	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)
			7.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		4.9	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal
			7.6	Meningkatnya daya beli masyarakat		4.10	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
	8.	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM	8.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal			
			8.2	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll)			



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

9.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	9.1	meningkatkan pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Strategi (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah	5.1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
10.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	10.1	Terpasarnya pariwisata daerah		5.2	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
11.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan	11.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah		5.3	Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
		11.2	Meningkatnya sektor ekonomi hijau		5.4	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan
					5.5	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.
					5.6	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya
12.	Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari	12.1	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup			
		12.2	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Misi 5		16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	16.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Strategi (7) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	7.1	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.		16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	16.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		7.2	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan
				16.3	Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah		7.3	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
				16.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		7.4	Peningkatan standar pelayanan public
				16.5	Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah		7.5	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
				16.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan		7.6	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi
							7.7	Reformasi Birokrasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menyusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas utama program-program beserta indikator kinerja program untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Program Utama/Prioritas Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas;
3. Revitalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenataram;
4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah
6. Peningkatan Partisipasi Publik;
7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program

Sebagai penyempurnaan daripada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya ***Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.***

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah.

Pencapaian ketujuh program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis antara target dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
Pencapaian Pemerataan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,66	669,96	Dinas PUPR
Meningkatkan cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90	91,4 82,19	Bag Perekonomian Setda Kab. Barsel
Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,50	55,71	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat	Jumlah rumah layak huni (unit)	28.063		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Persentase jaringan irigasi	100%	98%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Pencapaian Kawasan Kumuh	Rasio kawasan kumuh	15		Dinas Rumkimtan
Sanitasi Layak	Rasio kawasan sanitasi layak	65		Dinas Rumkimtan

Dalam capaian bidang Pemerataan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi Indikator Panjang jalan kondisi mantap (km), tercapai kondisi jalan yang memiliki persyaratan adm. Teknis dan laik fungsi 669,96 dari target 421,66
2. Sasaran Meningkatkan cakupan layanan kelistrikan dengan indikator Rasio elektrifikasi (%) tercapai untuk desa 91,4% dan Rumah Tangga 82,19% dari target 90%
3. Sasaran Meningkatnya cakupan layanan air bersih dengan indikator Persentase Penduduk berakses air minum tercapai 55,71 dari target 55,50
4. Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat dengan indikator Jumlah rumah layak huni (unit)



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

5. Sasaran Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian dengan indikator Rasio jaringan irigasi (ha)
 6. Sasaran Pencapaian Kawasan Kumuh dengan indikator Rasio kawasan kumuh
 7. Sasaran Sanitasi Layak dengan indikator Rasio kawasan sanitasi layak
2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas
- 2.1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata.

Tabel 12.
Pencapaian Bidang Pelayan Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	99,81		Dinas Pendidikan
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	12	12	Dinas Pendidikan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Meningkatnya peran pemuda	Cakupan pembinaan lembaga kepemudaan(%)	27	24	Dispraparbud
	Jumlah gelanggang olah raga		513	Dispraparbud
Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase prestasi olah raga (%)	20	20	Dispraparbud
Meningkatnya ketersediaan layanan dan akses perpustakaan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum pada ruang publik dan pedesaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.970	5.168	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28,757	16.745	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam capaian bidang pelayanan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

8. Sasaran Meningkatnya akses dan layanan pendidikan

bagi masyarakat dengan Indikator :

- Angka melek huruf tercapai dari target 99,81%
- Rata-rata lama sekolah (tahun) tercapai 12 thn dari target 12 thn

9. Sasaran Meningkatnya peran pemuda dengan indikator :

- Cakupan pembinaan lembaga kepemudaan tercapai 24% dari target 27%
- Jumlah gelanggang olah raga yang mendukung dalam kegiatan pemudaan 513 gelanggang

10. Sasaran Meningkatnya prestasi olah raga dengan indikator :

- Persentase prestasi olah raga tercapai 20% dari target 20%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

11. Sasaran meningkatnya ketersediaan layanan dan akses perpustakaan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum pada ruang publik dan pedesaan dengan indikator :

- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tercapai 5.168 orang melampaui target dari 3.970 orang
- Jumlah koleksi judul buku perpustakaan tercapai 16.745 judul dari target 28.757

2.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 13.
Pencapaian Bidang Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Menurunnya angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	89	178,2	Dinas Kesehatan
Menurunnya angka gizi buruk	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	0,4	0,3	Dinas Kesehatan
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas	Persentase penduduk miskin berobat	100	100	Dinas Kesehatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

pelayanan masyarakat bagi penduduk miskin	yang terlayani di pelayanan kesehatan			
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tata kelola layanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	41,6		Dinas Kesehatan
Penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar puskesmas dan rumah sakit	tersedianya tenaga dokter umum di puskesmas	12	10	Dinas Kesehatan
	Tersedianya dokter spesialis di rumah sakit	6	7	Dinas Kesehatan
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Persentase kasus DBD yang tertangani	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	54,1	55,1	Dinas Kesehatan

Dalam capaian bidang pelayanan kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat dengan indikator :
 - Angka harapan hidup (tahun)
 - Cakupan pelayanan masyarakat miskin
2. Sasaran menurunnya angka kematian ibu dengan indikator :
 - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
3. Sasaran menurunnya angka gizi buruk dengan indikator:
 - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

4. Sasaran meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan masyarakat bagi penduduk miskin dengan indikator :

- Persentase penduduk miskin berobat yang terlayani

5. Sasaran meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tata kelola layanan kesehatan

- Persentase puskesmas yang terakreditasi

6. Sasaran Penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar puskesmas dan rumah sakit

- Tersedianya tenaga dokter umum di puskesmas
- Tersedianya dokter spesialis di rumah sakit

7. Sasaran mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

- Persentase kasus DBD yang tertangani
- Persentase rumah tinggal bersanitasi

2.3. Revitalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang Aman dan Tenteram

Upaya menciptakan kondisi pengamalan agama yang baik adalah kerukunan antar umat beragama diantaranya agar terjalinnya dialog atau diskusi antar umat beragama untuk memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antar umat beragama berseteru.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Tabel 14.
Pencapaian Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam
Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang
Aman dan Tenteram Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan	90%	90%	

Dalam capaian bidang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Persentase tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan tercapai 90% dari target 90% dengan kegiatan melaksanakan safari ramadhan, safari natal dan safari nyepi untuk menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram

2.4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.

Tabel 15.
Pencapaian Program Peningkatan Kemandirian
Ekonomi Daerah Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya produksi hasil pertanian	Persentase pertumbuhan produksi rata-rata komoditas hortikultura	70%,	60,13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Produksi Tanaman Pangan		5,626,24	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya		8,759,74	Dinas KPPP

Dalam capaian bidang Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya produksi hasil pertanian dengan indikator :

- Persentase pertumbuhan produksi rata-rata komoditas tanaman pangan dan hortikultura

2. Sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan budidaya

2.5. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan harus dilandasi dengan pendekatan pendayagunaan sumberdaya alam dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Pola konsumsi sumberdaya alam seharusnya memberi kesempatan dan peran serta masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari.

Tabel 16.
Pencapaian Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah
Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Terciptanya pranata hukum yang mendukung iklim investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	8		
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Laju pertumbuhan investasi (%)	25		
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	4,1	45,98	Disnaktrans
Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	7,1		
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1.900	571	Disnaktrans



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	30	522	Disnaktrans
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	62	62	Disnaktrans
	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus)	5	5	Disnaktrans
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	2	2	Disnaktrans
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase K-UMKM aktif (%)	80	100	Dinasdagkop UKM
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Jumlah kunjungan wisatawan		4.634	Disporaparbud
Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Rp.)	568.009	23.161	Disporaparbud
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%)	70 (2 kasus)	100	Dinas Lingkungan Hidup



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

Meningkatkan perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	Persentase SKTA yang diterbitkan	26,25		Disrumkimtan
Meningkatnya partisipasi angka kerja perempuan	Persentase partisipasi angka kerja perempuan	47,50		Dinas naktrans

Dalam capaian bidang Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Terciptanya pranata hukum yang mendukung iklim investasi dengan indikator persentase jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
2. Sasaran meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dengan indikator laju pertumbuhan investasi (%)
3. Sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja dengan indikator angka partisipasi angkatan kerja tercapai 45,98 dari target 41,00
4. Sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator :
 - Laju pertumbuhan ekonomi
 - Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tercapai 571 orang dari target 1.900
 - Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat tercapai 522 dari target 30



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

- Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercapai 62 kasus dari target 62 kasus
 - Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun tercapai 5 kasus dari target 5 kasus
 - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah terealisasi dengan capaian 2 kasus dari target yang ditentukan yaitu 2 kasus
5. Sasaran meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dengan indikator Persentase K-UMKM aktif tercapai 100% dari target 80%
 6. Sasaran persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan 4.634 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Kabupaten Barito Selatan
 7. Sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Rp.) tercapai Rp. 23.161 dari target Rp. 568.009
 8. Sasaran meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%)



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

9. Sasaran meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator.....
10. Sasaran meningkatkan perlindungan bagi hak adat dan tanah adat dengan indikator persentase SKTA yang diterbitkan
11. Sasaran meningkatnya partisipasi angka kerja perempuan dengan indikator persentase partisipasi angka kerja perempuan

2.6. Peningkatan Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tabel 17.
Pencapaian Program Peningkatan Partisipasi Publik

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	- Kartu Keluarga (KK)		499	Dinas Dukcatpil
	- KTP – el		4.593	
	- Surat Keterangan Pindah (SKP)		4.269	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

	Penduduk			
	- Akta-akta Pencatatan Sipil : - Akta Kelahiran - Akta Kematian - Akta Perkawinan - Akta Perceraian		4.303 485 372 5	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi hak pilihnya pada pemilu	85	78,01	KPU Kab
Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	30	36	KPU Kab

Dalam capaian bidang Program Peningkatan Partisipasi Publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan indikator :
 - Kartu Keluarga (KK) tercapai dengan realisasi 499 KK
 - KTP – el tercapai dengan terealisasi 4.593
 - Surat Keterangan Pindah (SKP) Penduduk tercapai dengan realisasi 4.269
 - Akta-akta Pencatatan Sipil :
 - Akta Kelahiran dengan realisasi 4.303
 - Akta Kematian dengan realisasi 485
 - Akta Perkawinan dengan realisasi 372
 - Akta Perceraian realisasi 5
2. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan indikator partisipasi hak pilih pada pemilu tercapai 78,01% dari target 85%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

3. Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD dengan indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) tercapai 36% dari target nasional 30%

2.7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggara pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi dan integrasi organisasi serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efesien dan efektivitas. Disamping itu Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 18.
Pencapaian Program Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (2017)	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP	WDP	Inspektorat
Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82		Bag. Organisasi Setda
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi			Bag. Organisasi Setda
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah	C	C	Bag. Organisasi Setda
Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	Hasil predikat LPPD	B		Bag. Pemerintahan Setda
meningkatkan pengawasan bidang pemerintahan	tindak lanjut temuan	20	8	Inspektorat

Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Kinerja Opini BPK dengan target WDP dapat dicapai.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

2. Sasaran Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk tahun 2017 masih belum dilaksanakan, karena petunjuk teknis regulasinya masih belum jelas
3. Sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum dilaksanakan.
4. Sasaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan RB Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapat nilai 47,06 dibandingkan dengan hasil LaKIP Tahun 2016 mendapat nilai 42,52 ada kenaikan 4,54 dengan predikat penilaian masih kategori “C”
5. Sasaran Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator hasil predikat LPPD masih dalam proses penyusunan laporan.
6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan dengan indikator tindak lanjut temuan / pemeriksaan terhadap temuan BPK sebanyak 42 sesuai dengan rekomendasi 8, belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut 34.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017**

B. Anggaran Tahun 2017

Anggaran Tahun 2017 di tiap-tiap program utama/prioritas tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran *
1.	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	162.593.718.750,00
2.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Berkualitas	92.942.745.572,00
3.	Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenteram	6.114.195.300,00
4.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	12.126.737.200,00
5.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah	14.940.335.500,00
6.	Peningkatan Partisipasi Publik	16.950.862.300,00
7.	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	16.449.471.200,00
	JUMLAH	322.118.065.822,00



BAB IV PENUTUP

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat **keberhasilan dan kegagalan** pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 -2022

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada rentang tahun 2017-2022 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

Namun demikian, sangat disadari, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Dalam rangka mencapai target-target indikator yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***